



Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Menggunakan Teori *Fraud Triangle*: Pendekatan Studi Kasus

Analysis of Factors Influencing Corruption Using The Fraud Triangle Theory: A Case Study Approach

Rudy Hartanto^{1*}, Dwi Rahayu²

^{1*}Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Bandung, Indonesia

²Faculty of Vocational Studies, Universitas Sali Al-Aitaam, Indonesia

corresponding author e-mail: ¹rudyhartanto05@gmail.com

Makalah: Diterima 12 Agustus 2024; Diperbaiki 17 Agustus 2024; Disetujui 19 Agustus 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori fraud triangle. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif melalui studi kasus dan analisis mendalam terhadap jurnal-jurnal yang dipublikasikan di Google Scholar. Fokus utama dari penelitian ini adalah kasus korupsi yang melibatkan Hari Sabarno dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kasus ini diuraikan melalui tiga elemen utama dalam teori fraud triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lemahnya pengendalian internal, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas yang rendah merupakan faktor-faktor kunci yang mendukung terjadinya korupsi. Dalam konteks ini, kesempatan terwujud karena pelaku memiliki wewenang yang tinggi serta kurangnya pengawasan yang memadai. Tekanan muncul dari kebutuhan finansial yang mendesak serta gaya hidup mewah yang dijalani pelaku, sementara rasionalisasi didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan korupsi dapat diterima dalam situasi tertentu. Penelitian ini menyarankan perlunya upaya signifikan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki akuntabilitas dalam rangka mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi di masa depan.

Keyword: fraud triangle teori, kasus korupsi, pencegahan korupsi

Abstract

This study aims to analyze the key factors driving corruption in Indonesia using the fraud triangle theory. The research employs a qualitative method through case studies and in-depth analysis of journals published on Google Scholar. The primary focus of this research is the corruption case involving Hari Sabarno related to the procurement of fire trucks. This case is examined through the three main elements of the fraud triangle theory: pressure, opportunity, and rationalization. The findings reveal that weak internal controls, lack of transparency, and low accountability are significant factors supporting corruption. In this context, opportunity arises due to the perpetrator's high authority and insufficient oversight. Pressure stems from financial needs and a luxurious lifestyle, while rationalization is based on the belief that corrupt actions are acceptable under certain circumstances. The study recommends significant efforts to strengthen internal control systems, enhance transparency, and improve accountability to prevent and mitigate the likelihood of corruption in the future.

Keyword: fraud triangle theory, corruption, corruption prevention

1. Pendahuluan

Kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Menurut KBBI, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tercatat kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2023 ada sekitar 791 kasus korupsi yang terjadi (Indonesia Corruption Watch). Kasus korupsi terbesar yang pernah tercatat di Indonesia ialah kasus mantan presiden Soeharto yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan total perkiraan sebesar 15 hingga 35 miliar dollar AS atau sekitar Rp.490 triliun (Puspitasari, 2024).

Menurut beberapa penelitian sebelumnya, korupsi sektor publik menjadi isu yang sering dibahas karena meningkatnya permintaan masyarakat untuk transparansi dan keterbukaan informasi publik (Amran et al., 2021; Muhtar et al., 2018; Nurcholisah, Purnamasari, et al., 2023; Oktaroza,

Maemunah, et al., 2022; Oktaroza, Purnamasari, et al., 2022; Purnamasari, Amran, & Hartanto, 2022; Purnamasari, Amran, Nu'man, et al., 2022; Purnamasari & Hartanto, 2023; Purnamasari, Rahmani, et al., 2020; Purnamasari & Umiyati, 2019). Hal ini dikarenakan masyarakat merasa memiliki hak untuk mengetahui aliran uang pajak yang telah mereka bayarkan kepada negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan, rakyat, dan negara. Dikutip dari Kompas, ICW ungkap bahwa kasus korupsi paling besar di Indonesia pada tahun 2023 berada pada tingkat desa. Pada tahun 2023, terdapat 187 kasus korupsi di desa. Dari temuan mereka, aksi korupsi terbesar selain sektor pedesaan adalah pemerintahan (108 kasus), utilitas (103 kasus), dan perbankan (65 kasus) (Saptohutomo, 2024). Sistem pemerintahan daerah di Indonesia cenderung memberikan peluang terjadinya korupsi yang bersifat sistematis dan berdampak pada hampir seluruh bagian organisasi (Fadilah, Maemunah, & Hernawati, 2019; Fadilah, Rosidana, et al., 2021; Maria et al., 2018; Nurholisah, Nurleli, et al., 2023). Hal ini terlihat dari Laporan Tren ICW tahun 2018 yang menyebutkan bahwa kasus korupsi yang menyoroti kasus yang sistemik di daerah yang banyak diberitakan media pada tahun 2018. Misalnya saja, terdapat dakwaan suap terkait pengesahan amandemen konstitusi. RAPBD Kota Malang yang menetapkan anggota DPRD sebagai tersangka, kasus dugaan suap pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Sumut yang melibatkan gubernur dan 38 dan pejabat DPRD, dan yang terakhir tuntutan suap Jambi Gugatan pengesahan RAPBD telah menjaring kepala daerah dan 12 anggota DPRD (ICW, 2024).

Korupsi hanyalah salah satu dari banyak bentuk fraud, seperti halnya penyalahgunaan aset dan fraud pelaporan keuangan (Hartanto & Rahayu, 2024; Hartanto et al., 2024; Rahayu, 2023, 2024; Rahayu et al., 2024). Secara umum fraud adalah suatu perbuatan tidak adil yang bertujuan memperoleh keuntungan atas orang lain dan mementingkan kepentingan pribadi. Di sektor swasta, kecurangan diartikan sebagai pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan oleh seorang individu, dan pemimpin mempunyai hak untuk memutuskan apakah masalah tersebut harus diselesaikan secara legal atau legal (Maria et al., 2018).

Banyak makna dari fraud, seperti Menurut Tuanakotta (2010), yang mendefinisikan fraud di pemerintahan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan undang-undang lainnya. Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memeriksa, dan mengevaluasi keuangan negara sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Laporan keuangan pemerintah. Dalam implementasinya, SPKN mengadopsi faktor risiko teori segitiga fraud yang dikembangkan oleh Cressey (1953). Teori tersebut menyatakan bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya kecurangan: tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Maria et al., 2018). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang didasarkan pada teori fraud triangle untuk melihat modus-modus yang terjadi pada kasus-kasus fraud.

2. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan melalui peninjauan dan analisis terhadap jurnal-jurnal yang dipublikasikan dalam Google Scholar. Pemilihan Google Scholar sebagai sumber utama didasarkan pada keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan penelitian lapangan. Metode yang diterapkan mencakup beberapa langkah berikut: (1) Mengidentifikasi dan mempelajari teori fraud triangle serta jenis-jenis fraud, (2) Menganalisis contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia dengan menggunakan teori fraud triangle sebagai kerangka analisis, dan (3) Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi serta merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan tujuan penelitian, memastikan bahwa setiap temuan yang dihasilkan mendukung upaya untuk mencapai tujuan penelitian secara komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pendekatan Kasus

Contoh pendekatan kasus adalah dengan menggunakan kasus korupsi Hari Sabarno terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran berawal dari proyek pengadaan alat pemadam kebakaran yang berlangsung saat ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. Proyek ini diduga mengalami markup harga dan pelanggaran prosedur, yang mengakibatkan kerugian negara. Hari Sabarno dituduh memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan proyek tersebut kepada perusahaan tertentu tanpa

melalui proses tender yang seharusnya. Akibatnya, harga mobil pemadam kebakaran yang dibeli jauh lebih tinggi dari harga pasar. Kasus ini mencuat ketika ditemukan bukti adanya kerjasama antara pejabat pemerintah dan pihak swasta untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, merugikan negara dan masyarakat. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa Hari Sabarno bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara serta denda sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya.

Berdasarkan kasus yang disampaikan, jenis fraud yang terjadi adalah korupsi yang melibatkan kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pengadaan proyek mobil pemadam kebakaran. Faktor-faktor pendukungnya termasuk manipulasi dalam proses pengadaan, penggunaan posisi politik untuk memengaruhi keputusan, penyuapan, dan penggunaan radiogram atau surat edaran untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Pelaku utama atas terjadinya korupsi ini ialah Hari Sabarno selaku Menteri Dalam Negeri Kabinet Gotong Royong 2001-2004. Perbuatan Hari dan Oetanto menyebabkan kerugian negara sekitar 97,2 miliar. Hari Sabarno juga beberapa kali terkait kasus korupsi, dalam kasus pengadaan mobil damkar Hari Sabarno terbukti mendapatkan suap uang dan imbalan mobil Volvo senilai Rp808 juta. Berikut beberapa cara yang dilakukan oleh Hari Sabarno untuk menjalankan fraud:

- a) Hari Sabarno melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan cara menerima permintaan hengky yang merupakan pegawai swasta untuk melakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan maksud bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan. Hari juga memperkenalkan hengky dengan Dirjen Otonomi Daerah pada saat itu yaitu oetanto.
- b) Hari Sabarno melakukan pembebasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan PPH untuk 8 unit mobil kebakaran yang diimpor. Usulan membeli mobil kebakaran secara impor dan pembebasan pajak diberikan oleh Hengky, sebagai rasa terimakasih atas pembebasan pajak hengky memberikan imbalan kepada oetanto, dan hari sabarno yang digunakan untuk pengerjaan rumah pribadi hari.
- c) Hari Sabarno juga melakukan perintah kepada beberapa petinggi daerah untuk bekerjasama dengan cara menggelembungkan dana untuk mobil pemadam kebakaran yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pribadi.

3.2 Analisis Kasus berdasarkan Fraud Triangle Theory

Pendekatan analisis kasus fraud pada penelitian ini adalah berdasarkan fraud triangle teori, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kesempatan (Opportunity): Dalam kasus ini, kesempatan untuk melakukan fraud muncul karena beberapa faktor kunci. Pertama, Hari Sabarno sebagai Menteri Dalam Negeri dan Oetanto sebagai Dirjen Otonomi Daerah memiliki jabatan tinggi yang memberikan mereka posisi strategis untuk memengaruhi kebijakan. Kedua, mereka memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat edaran (radiogram) kepada seluruh kepala daerah, yang menjadi alat utama dalam tindakan fraud ini. Ketiga, kontrol yang lemah atau tidak adanya mekanisme checks and balances yang efektif memungkinkan mereka menggunakan wewenang tanpa pengawasan yang memadai. Sebagai bukti pendukung, Hari Sabarno memberikan memo disposisi untuk dibuatkan surat edaran dalam bentuk radiogram, dan Radiogram 027/1496/Otda tentang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang diterbitkan pada 12 Desember 2002 mengarahkan kepala daerah untuk melakukan pengadaan mobil damkar tipe V80 ASM.
- b. Tekanan (Pressure): Tekanan untuk melakukan fraud dalam kasus ini mungkin disebabkan oleh kebutuhan finansial atau keinginan untuk memperkaya diri, meskipun hal ini tidak disebutkan secara eksplisit. Indikasi adanya tekanan ini terlihat dari penerimaan suap yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti pengerjaan mebel rumah dan pembelian mobil mewah. Contoh konkret adalah penggunaan uang suap sebesar Rp396 juta oleh Hari Sabarno untuk pengerjaan mebel di rumahnya, serta penerimaan sebuah mobil Volvo tahun 2005 seharga Rp808 juta dari Hengky pada tahun 2004. Gaya hidup mewah yang mereka pertahankan memperkuat tekanan untuk menerima suap.
- c. Rasionalisasi (Rationalization): Rasionalisasi tindakan mereka mungkin berakar pada keyakinan bahwa mereka berhak menerima imbalan karena telah membantu Hengky dalam bisnisnya. Praktik suap mungkin juga dianggap sebagai kelaziman dalam lingkungan politik dan birokrasi, dipandang sebagai "kebiasaan" atau "tanda terima kasih." Selain itu, mereka mungkin merasa bahwa tindakan mereka tidak merugikan negara secara langsung, karena mobil pemadam kebakaran yang diadakan tetap dibutuhkan oleh daerah. Sebagai informasi pendukung, Hengky memberikan uang sebesar

Rp500 juta kepada Oentarto dan Rp396 juta kepada Hari Sabarno sebagai tanda terima kasih, menunjukkan bagaimana suap dapat dirasionalisasikan oleh para pelaku.

Kesimpulan dari kasus diatas, Kasus tersebut merupakan fraud korupsi karena pelaku menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara. Dilihat menurut teori fraud triangle (1) kesempatan pada kasus ini ialah jabatan yang tinggi, kewenangan atas kekuasaan dan kontrol yang lemah (2) tekanan pada kasus ini ialah kebutuhan finansial dan gaya hidup yang mewah dan (3) Rasionalisasi pada kasus ini ialah menganggap memberikan jasa yang harus dibayarkan dengan keuntungan, kelaziman praktik dan berpikir bahwa peristiwa tersebut tidak merugikan langsung. Dalam kasus ini pelaku utama yang mengawali kasus tersebut mempunyai jabatan yang tinggi dan juga menemukan partner yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan tindakan korupsi tersebut.

3.3 Faktor Utama dalam Korupsi

a. Lemahnya Pengendalian Internal

Salah satu faktor utama yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya korupsi ialah lemahnya pengendalian internal dalam perusahaan. Pengendalian internal yang lemah dapat mencakup seperti kurangnya pemisahan tanggungjawab, kurangnya pemantauan dan pengawasan terhadap transaksi maupun kegiatan yang berpengaruh pada perusahaan. Kelemahan dalam pengendalian internal dapat memberikan peluang bagi setiap individu yang tidak bermoral dan memiliki niat untuk melakukan manipulasi tersebut. Kelemahan pengendalian internal dapat ditunjukkan dari sistem informasi akuntansi yang tidak terintegrasi dalam hal pelaporan. Padahal sistem informasi akuntansi merupakan penunjang dalam hal pencatatan keuangan sehingga mencegah terjadinya kasus korupsi (Izzaturahman et al., 2023; Nurhayati, Hartanto, Paramita, et al., 2023; Nurhayati, Hartanto, & Pramono, 2023; Nurhayati & Susanto, 2017; Purnamasari, Pramono, et al., 2020).

b. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas yang buruk juga menjadi faktor utama dalam korupsi. Ketika tidak adanya mekanisme yang dapat melacak kegiatan atau transaksi, individu yang memang memiliki niat buruk akan dapat memanfaatkan situasi tersebut. Ketika tidak ada akuntabilitas yang jelas dan tindakan yang tidak etis tidak mendapatkan sanksi yang tegas, individu-individu tersebut merasa lebih berani untuk melakukan tindakan koruptif

c. Budaya Organisasi yang Tidak Etis

Budaya organisasi yang tidak etis atau toleransi terhadap perilaku korupsi juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi dan kecurangan pada laporan keuangan publik. Ketika organisasi memiliki budaya yang tidak menghargai integritas, transparansi, dan kejujuran, individu-individu di dalamnya cenderung merasa bahwa tindakan korupsi dan kecurangan dapat diterima atau diabaikan. Budaya organisasi yang tidak etis menciptakan lingkungan di mana tindakan fraud dianggap sebagai hal yang biasa dan dapat diterima.

d. Tekanan Finansial dan Personal

Tekanan finansial atau personal juga dapat menjadi faktor pendorong dalam terjadinya korupsi dan kecurangan pada laporan keuangan publik. Individu yang menghadapi tekanan keuangan yang besar atau memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang signifikan mungkin tergoda untuk melakukan tindakan koruptif (Kurniawan, A. 2018). Tekanan finansial dan personal dapat mendorong individu untuk mencari cara cepat dan tidak jujur untuk memperoleh uang atau aset. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini penting bagi organisasi untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pengendalian yang efektif. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor tersebut, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang jujur, transparan, dan bebas dari korupsi serta kecurangan pada laporan keuangan public.

3.4 Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat terjadinya korupsi

a. Menerapkan Pengendalian Internal yang Kuat

Untuk melakukan pencegahan sebelumnya kita harus memperbaiki pengendalian internal dalam perusahaan, karena pengendalian internal yang kuat itu sangat penting. Hal ini melibatkan proses pengawasan dan pemisahan tugas yang jelas, serta pemantauan transaksi keuangan yang ketat. Dengan menerapkan pengendalian internal yang baik, peluang untuk melakukan kecurangan akan berkurang karena adanya pengawasan dan pemisahan tugas yang efektif.

- b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan publik dapat menjadi langkah penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Proses pelaporan keuangan yang jelas dan transparan, serta pemantauan yang ketat terhadap penggunaan dana publik, akan memberikan kejelasan dan pemahaman yang lebih baik bagi semua pihak terkait (Fadilah, Nurleli, et al., 2021; Lestari et al., 2022; Tarmidi et al., 2023). Selain itu, adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif, seperti audit eksternal yang independen, dapat membantu mendeteksi potensi kecurangan (Fadilah, Maemunah, Lim, et al., 2019).
- c. Membangun Budaya Organisasi yang Etis
Membangun budaya organisasi yang etis sangat penting dalam mencegah dan mengurangi risiko korupsi. Pemimpin organisasi harus memberikan contoh yang baik dalam hal integritas dan etika, serta mempromosikan nilai-nilai transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas. Pelatihan dan kesadaran terhadap etika bisnis dan tindakan korupsi juga dapat diberikan kepada seluruh anggota organisasi.
- d. Menerapkan Analisis Risiko
Melakukan analisis risiko secara teratur dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap kecurangan dan korupsi. Dengan mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul, organisasi dapat mengarahkan sumber daya mereka untuk melakukan pencegahan yang lebih efektif. Analisis risiko juga memungkinkan pengembangan strategi pengendalian yang lebih spesifik dan dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan.
- e. Mendorong Pelaporan dan Whistleblowing
Mendorong pelaporan dan whistleblowing yang aman dan terpercaya juga penting dalam upaya mencegah dan mendeteksi kecurangan. Organisasi harus memiliki mekanisme pelaporan yang jelas dan aman bagi anggota mereka untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan atau korupsi. Selain itu, perlindungan terhadap whistleblower harus dijamin untuk mencegah pembalasan atau intimidasi terhadap mereka yang melaporkan kecurangan. Memberikan Pendidikan dan Kesadaran Anti-Fraud
Mengadakan pelatihan anti korupsi sebagai pelatihan reguler bagi seluruh pejabat dan staf terkait mengenai etika, kepatuhan, dan pencegahan korupsi dan juga meningkatkan kesadaran tentang kebijakan anti-fraud dan konsekuensi hukuman bagi mereka yang melanggar.

4. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia, khususnya yang melibatkan pejabat pemerintah, sering kali disebabkan oleh tiga faktor utama yang dijelaskan dalam teori fraud triangle: kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Kesempatan muncul karena lemahnya pengendalian internal, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan, yang memungkinkan para pejabat memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Tekanan, baik dalam bentuk kebutuhan finansial maupun gaya hidup mewah, mendorong individu untuk melakukan tindakan korupsi. Sementara itu, rasionalisasi terjadi ketika pelaku meyakini bahwa tindakan mereka dapat diterima atau dianggap wajar dalam konteks politik dan birokrasi. Kasus korupsi Hari Sabarno yang dianalisis dalam penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa ketiga faktor tersebut saling terkait dan berperan signifikan dalam mendorong terjadinya korupsi. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus difokuskan pada penguatan pengendalian internal, peningkatan transparansi, dan pembudayaan integritas di kalangan pejabat pemerintah.

Daftar Pustaka

- ACFE. (2021). *Survei Fraud Indonesia 2019*. A. o. C. F. E. A. C. Indonesia.
- Amran, N. A., Nor, M. N. M., Purnamasari, P., & Hartanto, R. (2021). Perspectives on Unethical Behaviors among Accounting Students in Emerging Markets. *International Journal of Innovative Research Scientific Studies*, 4(4), 247-257.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*.
- Fadilah, S., Maemunah, M., & Hernawati, N. (2019). Community social empowerment in Zakat community development. *Mimbar*, 35, 471-480.
- Fadilah, S., Maemunah, M., Lim, T. N., & Sundary, R. I. (2019). Forensic accounting: fraud detection skills for external auditors. *Polish Journal of Management Studies*, 20.

- Fadilah, S., Nurleli, N., Rosdiana, Y., Nurcholisah, K., Maemunah, M., & Hartanto, R. (2021). Measuring The Performance of Zakat Programs Using The Activity Ratio. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2), 314-326.
- Fadilah, S., Rosidana, Y., Maemunah, M., Hernawati, N., Sukarmanto, E., & Hartanto, R. (2021). Multidimensional scaling (Mds): Sustainability assessment model of community economic empowerment. *Polish Journal of Management Studies*, 24.
- Hartanto, R., & Rahayu, D. (2024). Implementation of Good Corporate Governance in Improving Company Financial Performance (A Case Study of PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk). *Insight Management Business*, 2(1), 13-23.
- Hartanto, R., Sukarmanto, E., Rahayu, D., Aulia, A. T., & Puspita, N. D. (2024). Peran Struktur Tata Kelola dalam Mencegah Kecurangan Internal di Perbankan Indonesia. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 7(1), 52-63.
- ICW. (2024). *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018 Semester I*. Indonesian Corruption Watch. Retrieved 11 November from <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2018-semester-i>
- Izzaturahman, M. K., Lestari, R., & Nurhayati, N. (2023). What Drives MAIS Quality of Islamic Banks in Indonesia? *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(2), 613-632.
- Laudeciska, L., Yanni, Y., & Yunita, Y. (2023). Fraud Laporan Keuangan: Preventif Terhadap Fraud Pada Perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 187-200.
- Lestari, R., Purnamasari, P., & Sukarmanto, E. (2022). Autokorelasi Laba Dan Volatilitas Laba: Peningkat Audit Delay? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 260-274.
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2018). Eksplorasi faktor tekanan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 111-126.
- Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesian local government: Study on triangle fraud theory. *International Journal of Business Society*, 19(2), 536-552.
- Nurcholisah, K., Nurleli, N., & Nurfahmiyati, N. (2023). Intellectual capital profile dengan pendekatan VAIC: efisienkah di bank syariah. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1650-1656.
- Nurcholisah, K., Purnamasari, P., & Sukarmanto, E. (2023). Analisis Tren Kecurangan Laporan Keuangan Perbankan: Pre Dan Post Pandemic Covid Di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 202-215.
- Nurhayati, N., Hartanto, R., Paramita, I., Sofianty, D., & Ali, Q. (2023). The predictors of the quality of accounting information system: Do big data analytics moderate this conventional linkage? *Journal of Open Innovation: Technology, Market, Complexity*, 9(3), 100105.
- Nurhayati, N., Hartanto, R., & Pramono, I. P. (2023). An Empirical Study on the Impacts of Quality Information and Competency of User on the Quality of Zakat Management Information System in Indonesia. *Journal of System Management Sciences*, 13(3), 233-243.
- Nurhayati, N., & Susanto, A. (2017). The influence of transformational leadership on the success of accounting information systems implementation (Survey on national Zakat management institution of West Java). *Journal of Engineering Applied Sciences*, 12(17), 4534-4539.
- Oktaroza, M. L., Maemunah, M., Hartanto, R., & Purnamasari, P. (2022). Work Ethics Strengthen the Impact of Distribution Knowledge Sharing on Innovation Abilities in Small Public Accountant Firms. *Journal of Distribution Science*, 20(7), 35-46.
- Oktaroza, M. L., Purnamasari, P., Hartanto, R., & Rahmani, A. N. (2022). Red Flag Effectiveness in Public Sector Audit Using Fraud Pentagon Theory. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 338-347.
- Purnamasari, P., Amran, N. A., & Hartanto, R. (2022). Modelling computer assisted audit techniques (CAATs) in enhancing the Indonesian public sector. *F1000Research*, 11.
- Purnamasari, P., Amran, N. A., Nu'man, A. H., Frendika, R., Nor, M. N. M., & Ismail, M. S. (2022). Penta-helix model of e-government in combating corruption in indonesia and malaysia: The moderating effect of religiosity. *F1000Research*, 11.
- Purnamasari, P., & Hartanto, R. (2023). *Fraud early warning system dan computer assisted audit technique*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

- Purnamasari, P., Pramono, I. P., Haryatiningsih, R., Ismail, S. A., & Shafie, R. (2020). Technology acceptance model of financial technology in micro, small, and medium enterprises (MSME) in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics Business*, 7(10), 981-988.
- Purnamasari, P., Rahmani, A. N., & Hartanto, R. (2020). Does Spirituality In The Workplace Reflect The Relationship Between Accounting And Corruption Prevention? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 414-429.
- Purnamasari, P., & Umiyati, I. (2019). Asymmetric Cost Behavior and Choice of Strategy. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 24-33.
- Puspitasari. (2024). *ICW Catat 791 Kasus-1.695 Tersangka Korupsi di 2023: Ada Lonjakan Masif*. detiknews. Retrieved 1 Juli from <https://news.detik.com/berita/d-7347964/icw-catat-791-kasus-1-695-tersangka-korupsi-di-2023-ada-lonjakan-masif>
- Rahayu, D. (2023). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Periode Terjadi Covid19 Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (JEMSI)*, 9(3), 762-773.
- Rahayu, D. (2024). Personal Values, Ethical Orientation, and Ethical Behavior in Accounting Students as Prospective Professional Accountants. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 10(1), 1-12.
- Rahayu, D., Hartanto, R., Rohayati, I., & Harni, R. (2024). Fraud Prevention Strategies In Indonesian MSMEs: The Significance of Honesty And Internal Control Factors. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 427-440.
- Saptohutomo, A. (2024). *ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi*. Kompas.com. Retrieved 10 Juli from <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/icw-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>.
- Tarmidi, D., Rosdiana, Y., & Helliana, H. (2023). Earnings quality: The role of owners. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 1-12.
- Tuanakotta, T. (2010). *Akuntansi forensik dan audit investigatif*. Salemba Empat.
- Wells, J. T. (2014). *Principles of fraud examination*. John Wiley & Sons.
- Winoto, S. (2022). *Analisis kriminologi terhadap praktik suap pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan Universitas Islam Negeri Walisongo*. Jakarta.
- Yunita, A., Wardhani, R. S., Levany, Y., Rahmadoni, F., Fibrianto, A., & Martoyo, A. (2023). *Manajemen Risiko Fraud*. TOHAR MEDIA.